

## **BAB II**

### ***LITERATUR REVIEW, KERANGKA TEORI, HYPOTESIS***

#### **2.1 Respon Bencana Selama Erupsi Merapi dan Sesudah Erupsi Merapi**

Gunung merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2980 meter dari permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7°32.5' lintang selatan dan 110°26.5' Bujur Timur. Secara Administratif terletak pada wilayah Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 20 september 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari normal menjadi waspada dan selanjutnya ditingkatkan menjadi siaga yaitu level II pada oktober 2010. Sejak 25 oktober Pukul 06.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) status kegiatan merapi dinaikan dari siaga menjadi awas yaitu level IV dan pada 26 oktober 2010 gunung merapi mengalami erupsi pertama dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010. Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1994,1997,1998,2001 dan 2006 (BAPPENAS, 2011).

Dilihat dari historinya Gunung Merapi telah melakukan beberapa kali letusan. Berdasarkan data Dari BNPB (2019), pada periode 3000-250 tahun yang lalu Tercatat kurang lebih 33 kali letusan Gunung Merapi, 7 di antaranya merupakan letusan besar. selanjutnya pada masa purbakala, letusan besar Gunung Merapi terjadi sekali dalam 150-500 tahun. kemudian, Periode Merapi baru, abad

18-19 Pada masa ini, letusan terjadi lebih sering. Tercatat, sejak tahun 1768-1872, ada lebih dari 80 kali letusan terjadi. Sedangkan letusan besar terjadi pada tahun 1768,1822,1849 dan 1872. Erupsi pada abad ini lebih besar dibandingkan abad ke-20, di mana awan panas mencapai 20 kilometer dari puncak. Pada abad ke-20 terjadi minimal 28 kali letusan, di mana letusan terbesar Gunung Merapi terjadi pada 1931. Kejadian tersebut diperkirakan menimbulkan ribuan korban jiwa dan menghancurkan 13 desa dan 23 desa lainnya rusak parah. Kemudian, pada 1933-1935 dan 1961 terjadi erupsi eksplosif yang menimbulkan banjir lahar. Setelah itu, tahun 1994 meletus dengan meruntuhkan kubah lava dengan volume 2,6 juta meter kubik. Gunung Merapi kala itu memuntahkan awan panas sejauh 6,5 kilometer ke arah barat laut dan selatan hingga mengakibatkan 64 orang tewas dan puluhan luka-luka. Tahun 2006 Letusan pada 2006 telah merusak kawasan Kali adem yang menewaskan dua orang relawan karena diterjang awan panas. Munculnya letusan ditandai dengan gempa dan deformasi. Setelah itu terjadi hujan abu vulkanik selama 3 hari di Magelang serta Sleman, Jawa Tengah. Tahun 2010 Letusan Gunung Merapi pada 2010 menjadi yang terbesar selama 100 tahun terakhir. Letusan ini mengakibatkan korban 341 orang meninggal dunia, puluhan desa rusak dan ratusan ribu orang pengungsi. Kemudian, pada pertengahan 2018 lalu, Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas hingga akhir Januari 2019. Pemantauan terhadap aktivitas Merapi yang cenderung meningkat terus dilakukan.

Berdasarkan data Pusdalops BNPB tanggal 27 November 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 242 Jiwa data

ini hanya untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta saja, Sedangkan untuk daerah Jawa Tengah tercatat 97 orang meninggal. Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sector permukiman, infrastruktur, sosial dan ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Merapi telah mengakibatkan terkuburnya beberapa dusun di Kabupaten Sleman dan menimbun serta merusak pemukiman penduduk. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat 3.424 rumah mengalami kerusakan dengan rincian 2.636 rumah rusak berat, 156 rumah rusak sedang dan 632 rumah rusak ringan (Bappenas,2011).

Sesuai data yang dihimpun oleh BNPB pertanggal 31 Desember 2010, berdasarkan hasil pengkajian kerusakan dan kerugian sebesar Rp 3.628 Triliun. Akibat dampak kerusakan dan kerugian, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitas dan rekontruksi pasca bencana erupsi Merapi di DI Yogyakarta sebesar RP. 770,90 Miliar. Kebutuhan pemulihan di peruntukan bagi pendanaan sektor infrastruktur sebesar Rp.417,67 Miliar (30,92% dari total kebutuhan pendanaan), kemudian disusul kebutuhan pemulihan Lintas Sektor sebesar Rp 313,53 Miliar (23,21%), sektor Perumahan sebesar Rp.247,15 Miliar (18,30%), Sektor Ekonomi Produktif Rp.223,01 Miliar (16,51%) dan Sektor Sosial sebesar Rp. 149,25 Miliar (11,05%) (BAPPENAS, 2011).

Dalam hal ini pemerintah bersama semua stakeholders menyusun sebuah perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten dan masyarakat. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi memuat kebijakan yang diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana di setiap sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan cukup besarnya kerusakan dan kerugian yang perlu dipulihkan di tingkat lapangan, maka belajar dari pengalaman penanganan pemulihan pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006 di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, maka dalam penanganan pemulihan pascabencana erupsi Merapi, akan dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden dan guna mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi akan dibentuk Tim Pendukung Teknis (TPT) yang struktur dan keanggotaannya akan ditetapkan melalui

Peraturan Kepala BNPB. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi yang telah selesai disusun melalui koordinasi Bappenas dan BNPB, ditargetkan untuk dapat ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB. Penerbitan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah terkait dengan melakukan: (a) revisi RTRW Provinsi/Kab/Kota wilayah terdampak, sesuai rekomendasi Kementerian ESDM dan penetapan KRB 3 (area terdampak langsung) Erupsi Merapi sebagai kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dan oleh Kementerian Kehutanan; (b) penataan kawasan lindung dan lokasi relokasi masyarakat korban yang tinggal di KRB 3 Merapi, termasuk penatagunaan lahannya oleh Pemda Prov/Kab/Kota; dan (c) pendataan/penetapan masyarakat korban yang akan direlokasi ke lokasi relokasi (swadaya atau pemerintah), serta yang akan potensial dan berminat untuk ditransmigrasikan oleh Pemda Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari penjelasan diatas bahwa Karakteristik dilingkungan kelembagaan dirasa perlu untuk mengatasi masalah publik yang kompleks namun terkadang justru kolaborasi yang dijalan justru gagal dilakukan. Kegagalan upaya untuk memecahkan masalah publik dan lainnya di pengaruhi faktor oleh lingkungan yang ada kaitanya dengan hubungan antar organisasi dan kolaborasi lintas sektor (Bryson, Crosby, & Stone, 2006).

## ***2.2 Collaborative Governance***

Keprihatinan sosial di seluruh sektor di masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik dan ini bisa menjadi sebuah tekad melalui kerjasama antara lembaga publik dan swasta. Kolaborasi atau kadang-kadang disebut sebagai koordinasi juga bisa merujuk ke kolaborasi lintas sektor (Bryson et al., 2006), tata kolaboratif (Ansell & Gash, 2008) atau tata kelola jaringan (Provan & Kenis, 2008).

Umumnya, tata kelola berkaitan dengan kegiatan dan mekanisme yang dimana masyarakat adalah salah satu fokus utama untuk mengatasi masalah publik melalui pelayanan publik yaitu seperti (jalan, sekolah, pekerjaan, makanan, perdamaian, dan ketertiban, dll). Namun, karena kebutuhan dan tuntutan pertumbuhan yang tetap *unfixed*, maka timbulah ketidakpercayaan publik sehingga tumbuh pemikiran-pemikiran negatif. Pemikiran-pemikiran seperti itu terkadang melihat pemerintah telah boros terhadap sumber daya negara dan gagal untuk mewakili kepentingan masyarakat (Worden, 2019).

Oleh karena itu, lembaga-lembaga publik telah "diciptakan kembali" dirinya untuk menjadi lebih praktis bertujuan berfokus pada sektor bisnis atau prinsip-prinsip *performance based*, manajemen klien-sentris dan output serta dampak tujuan yang dimaksudkan untuk menghasilkan penghematan dan kepuasan publik sehingga semua itu dapat ditingkatkan (McBeath & Meezan, 2019).

Fung, (2015) menjelaskan bahwa pemerintahan hanya dapat efektif jika pengaturan tata kelola dapat ditetapkan atau direncanakan dan diatasi sehingga menghasilkan sebuah pemecahan masalah substantive. Di sisi lain, pada abad ke-21 pemerintah telah melampaui seluruh permasalahan yang ada sehingga pemerintah sekarang lebih bersifat demokratis, pemerintah demokratis bisa melakukan apapun seperti : hak asasi manusia, sengketa teritorial, perdamaian dan ketertiban, keamanan dan lain-lainnya. Masalah-masalah ini mendorong pemerintah untuk merangkul inovasi antara mekanisme dan strategi untuk menjadi lebih efektif.

Sebagai sebuah konsep, kolaborasi didefinisikan oleh Imperial, (2019) sebagai “hubungan *purposive* yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan menciptakan atau menemukan solusi dalam permasalahan yang ada.” Jadi, kolaborasi terjadi dengan melintasi batas-batas organisasi dan sektoral.

Emerson, Nabatchi, & Balogh (2011) mendefinsikannya kolaborasi pemerintahan sebagai proses dan stuktur dari pengambilan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat, swasta, *NGOs*, dari berbagai institusi dan level yang ada untuk menentukan tujuan bersama yang sulit untuk bisa dirumuskan sendiri. Sementara Quik, Wright, Rashid, & Thiruchelvam, (2015) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah konsep di dalam management pemerintahan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun *NGOs* yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi pemerintah saja. Paradigma lain tentang *collaborative governance* dikemukakan

oleh Hartley, Sorensen, & Torfing (2019), yang mendefinisikan bahwa kerjasama memiliki makna bekerjasama atau bekerja bersama-sama dengan pihak lain, baik sifatnya individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan merujuk pada Jung, Mazmanian, & Tang (2009), mengemukakan bahwa kerjasama mencakup beberapa dimensi: Pertama, mencakup *co-operation* untuk membangun kebersamaan, meningkatkan konsistensi, dan meluruskan aktivitas antar aktor. Kedua, kerjasama bisa juga merupakan sebagai proses negosiasi, yang mencakup suatu persiapan untuk berkompromi dan membuat kesepakatan. Ketiga, bisa juga merupakan bentuk antisipasi bersama melalui serangkaian aturan terhadap kemungkinan kekeliruan yang akan terjadi. Keempat, kerjasama juga bisa merupakan kekuasaan dan paksaan, kemampuan untuk mendorong hasil. Kelima, kerjasama mencakup komitmen masa depan dan intensitasnya, perencanaan atau persiapan untuk meluruskan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dan terakhir, kerjasama mencakup keterlibatan, proses pengembangan motivasi internal dan komitmen personal terhadap proyek yang akan dikerjakan.

Karena itu, Ansell & Gash (2008) kolaborasi adalah hubungan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menciptakan solusi dalam kondisi keterbatasan misalnya keterbatasan informasi, waktu dan ruang. Hal ini serupa dengan pendapat Kapucu, Arslan, & Demiroz (2010) yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses adanya kesadaran dari berbagai pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk kemudian mencoba mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi. Simo & Bies (2019) juga mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu

kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa, awalnya organisasi adalah otonom, lalu ada keterbatasan dalam mencapai tujuan. Kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut melatarbelakangi organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi atau individu lain.

Sementara itu, Bryson et al., (2006) didefinisikan kolaborasi lintas sektor (*cross sector*) sebagai proses "menghubungkan atau berbagi informasi, sumber daya, kegiatan, dan kemampuan organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk mencapai bersama-sama suatu hasil yang tidak dapat dicapai oleh organisasi di satu sektor secara terpisah. semacam ini kolaborasi mengakui keterbatasan dan kekuatan dari setiap sektor dan kerjasama antara dan di antara mereka melengkapi fungsi masing-masing sektor. Meskipun ideal, kolaborasi tidak bekerja sepanjang waktu.

Perspektif lainnya dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *collaborative governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan dimana institusi-institusi pemerintahan secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintah (baik masyarakat/komunitas, *NGOs*, dan *private sector*) di dalam proses pengambilan keputusan secara formal, yang berorientasi pada kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola program dan sumber daya secara bersama. Dari perspektif ini menurut Ansell & Gash (2008) ada beberapa kata kunci penting yang harus dicatat yaitu: (1) kerjasama diinisiasi oleh institusi pemerintahan, (2) adanya keterlibatan aktor non-pemerintah, (3) seluruh aktor terlibat dalam proses

pengambilan kebijakan, (4) forum kerjasama diorganisir dan dirancang secara bersama, (5) tujuan dari forum kerjasama adalah untuk membuat keputusan bersama-sama, dan (6) fokus dari kerjasama adalah dalam pengemabilan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Dengan menggunakan istilah yang berbeda yaitu *cross-sector collaboration*, Bryson, Crosby, & Stone (2015) mendefinisikan kerjasama sebagai proses sharing informasi, *resources*, aktivitas dan kapabilitas yang dilakukan oleh berbagai organisasi di dalam satu atau beberapa sektor untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yang tidak bisa didapatkan apabila hanya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berada pada satu sektor saja. Bryson dan Corby menegaskan bahwa penggunaan istilah *cross-sector collaboration* untuk menunjukkan adanya keterlibatan pihak pemerintah, bisnis, nonprofit, komunitas, dan institusi-institusi publik lainnya secara keseluruhan. Dari ilustrasi beberapa definisi yang dikemukakan tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu paradigma baru dalam pemerintahan di mana masyarakat, sektor bisnis, *NGOs*, dan *stakeholder* lainnya dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan tatakelola pemerintahan secara umum. Orientasi dari pelibatan tersebut merupakan upaya dalam menyelesaikan masalah besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, akan tetapi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Sehingga orientasinya adalah keberhasilan dari kebijakan tersebut sesuai dengan cita-cita dan tujuan bersama. Sekalipun idealnya inisiasi dari kerjasama tersebut haruslah datang dari pemerintah. Dalam merumuskan ketinggian yang

lebih praktis, beberapa ilmuwan sudah merumuskan model bagaimanakah kerangka kerja dari *collaborative governance* tersebut.

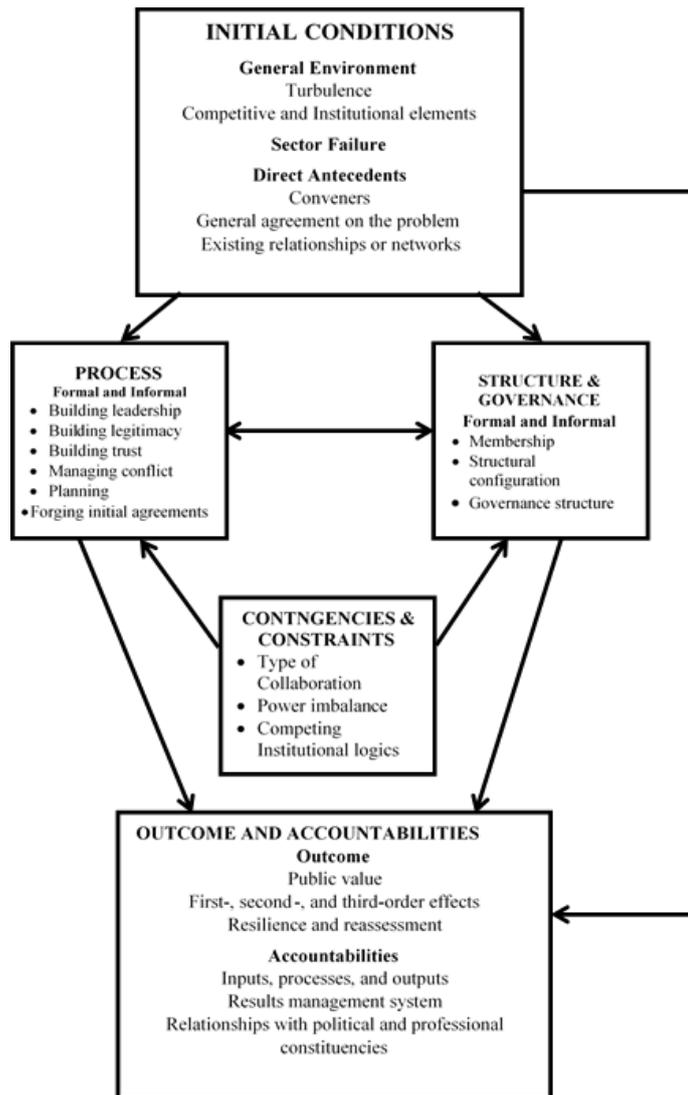
Seperti misalnya model yang dikembangkan oleh Thomson & Perry (2019) yang memulai proses *collaboration* dari negosiasi, komitmen dan pelaksanaan yang dinaungi oleh *assessment*. Dimana dalam operasionalnya negosiasi berarti proses bargaining antar aktor yang akan terlibat di dalam *collaboration*. Setelah terjadi negosiasi maka akan muncul komitmen dari masing-masing aktor atas apa yang akan dilakukan di dalam kerjasama tersebut. Sementara proses pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari komitmen bersama yang telah diambil melalui keterlibatan seluruh aktor dan interaksi antar aktor. Selain itu, untuk menjaga kerjasama perlu adanya *assessment* untuk melihat dari setiap proses yang ada tersebut sejauh mana keaktifan dan keterlibatan masing-masing aktor.

Model lainnya dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design*, *collaborative process*. Di dalam *starting condition* yaitu tahapan fasilitasi kerjasama di antara stakeholder yang ada. Ada dua isu penting dalam tahapan ini yaitu ketidakseimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dan pemberian insentif agar *stakeholders* berpartisipasi. Apabila sumberdaya dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* tidak seimbang, maka kerjasama akan dimanipulasi oleh *stakeholders* yang memiliki sumberdaya dan kekuatan yang banyak. Oleh karenanya jika hal itu terjadi, maka mesti ada komitmen untuk membantu *stakeholders* yang lemah. Hal lainnya yang

tidak kalah penting adalah keharusan adanya *insentive* supaya *stakeholders* yang lemah bisa gigih bergabung untuk bekerjasama. Dan terakhir mesti adanya antisipasi terhadap terjadinya konflik di dalam kerjasama sehingga di awal harus dibangun rasa percaya antar satu dengan yang lain. Sementara di tahap *facilitative leadership* atau memfasilitasi adanya kepemimpinan, merupakan tahapan yang sangat penting sekali untuk melibatkan *stakeholders* di dalam satu kesatuan, mendekatkan satu sama lain, dan menyatukannya di dalam satu spirit. Selain itu kepemimpinan pun sangat penting untuk menjaga aturan main yang ada di dalam kerjasama, membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama (Ansell & Gash, 2008). Selanjutnya adalah tahapan *institutional design* atau mendesign institusi kerjasama. Dimana institusi ini merupakan aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka. Dan tahap yang terakhir barulah *collaborative process*. Proses dalam kerjasama ini merupakan membangun tahapan yang dimulai dari *face-to-face dialogue* yang berorientasi pada kesepakatan bersama. Dilanjutkan dengan membangun kepercayaan antar satu dengan yang lain, dan komitmen bersama untuk bersama-sama bekerjasama, sehingga bisa memunculkan adanya pemahaman bersama. Barulah setelah semua berjalan dengan baik akan bisa tercapai *outcomes* sebagaimana yang diharapkan (Ansell & Gash, 2008)

Model lainnya adalah model yang cukup terkenal yang dipopulerkan Bryson et al. (2006) dengan istilah *cross-sector collaboration*. Dan di dalam buku ini teori tersebut akan digunakan khususnya di dalam tahapan proses. Dimana

*collaborative governance terdiri dari initial condition, structure and governance, process, contingencies and constraints, outcomes and accountabilities.*



Gambar 2.5 Cross-sektor Kolaborasi Model Bryson, Stone, dan Crosby (2006)

Berdasarkan literatur diatas, lintas sektor kolaborasi sebagian digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kemitraan dari dua atau lebih lembaga dan organisasi yang melintasi batas-batas sosial dan politik untuk saling mengatasi keprihatinan sosial, di mana sumber daya dan kapasitas terbagi ataupun terhubung antara mitra yang berkelanjutan, ini bisa dikatakan mampu memperkuat kolaborasi antar mitra. Tanpa kemitraan tersebut, manajemen publik hampir tidak bisa tercapai.

### **2.2.1 Bagaimana Struktur jaringan dijalankan dalam penanggulangan tanggap bencana?**

Karakteristik dilingkungan kelembagaan dirasa perlu untuk mengatasi masalah publik yang kompleks namun terkadang justru kolaborasi yang dijalankan justru gagal dilakukan. Kegagalan upaya untuk memecahkan masalah publik dan lainnya di pengaruhi faktor oleh lingkungan yang ada kaitanya dengan hubungan antar organisasi dan kolaborasi lintas sektor (Bryson et al., 2006). Sementara itu, mengacu pada gagasan kinerja yang baik selama bencana "kemampuan untuk menilai dan mengadaptasi kapasitas, memulihkan atau meningkatkan justru terganggu dengan komunikasi yang tidak memadai, yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang fleksibel dan tidak biasa, maka perlunya perluasan koordinasi dan kepercayaan terhadap semua mitra atau *stakeholders* didalam merespon tanggap darurat "(Kapucu & Wart, 2006). Terutama, solusi pemerintah dalam membentuk kebijakan dan regulasi adalah produk dari kegagalan pasar atau sektor. Pelajaran dari kinerja sebelumnya (*Previous Performance*) harusnya menjadi suatu pelajaran agar kegagalan didalam menjalankan kolaborasi lintas

sektor bisa diminimalisir sehingga ini menjadi dasar untuk memberikan komitmen kepada semua *stakeholder* sehingga semua *stakeholder* atau mitra dapat menjadi seorang yang berkomitmen didalam tanggap darurat, serta meningkatkan informal dan formal perjanjian dalam kolaborasi terutama dalam hal komposisi dan akuntabilitas (Bryson et al., 2015). Apalagi, percaya pada istilah ikatan umum dan kepercayaan dalam kompetensi organisasi mungkin telah dikembangkan meskipun upayanya gagal, menuju kolaborasi yang sukses dan dapat menjadi dasar dalam memulai upaya kolaboratif baru (Edmondson, 2011). Sementara itu, penyebab dan implikasi dari kegagalan sektor ini dapat mengarah pada ukuran yang efektif di Indonesia didalam mengelola konflik (Olu & Adesubomi, 2014) dan proses perencanaan (Sial et al., 2011).

Selain itu, menempa perjanjian awal (*Intial Agreement*) dengan menyediakan insentif dan mekanisme motivasi yang tepat menumbuhkan komunikasi dan kepercayaan antar organisasi, meningkatkan koordinasi jaringan antar organisasi dalam manajemen darurat operasi respons (Kapucu, 2005); (Ansell & Gash, 2008); (Tang & Shui-Yan, 2014). Studi Jung et al. (2009) dan Tang & Shui-Yan (2014) di bidang manajemen kolaboratif membahas pentingnya insentif yang tepat sebagai motivasi dan berbagai dinamika yang menyertainya. Pertama, menyarankan agar kolaborasi dapat dianalisis dengan melihat bagaimana lembaga dan organisasi mempersepsikan kolaborasi, niat dan kemauan mereka untuk berkolaborasi. Di sisi lain, insentif dan motivasi lainnya harus dilaksanakan sesuai dengan urutan dan cara yang benar agar menjadi efektif (Tang & Shui-Yan, 2014). Worden, (2019) menjelaskan motivasi pelayanan publik sebagai

altruism, ia mengatakan bahwa “motivasi altruistic umumnya untuk melayani kepentingan komunitas orang dan sebagai bentuk pengorbanan diri, itu semua adalah bentuk dari aspek pelayanan publik yang baik, membuat individu berkomitmen pada organisasi didalam melakukan perubahan (Hetherington & Rudolph, 2019). Karena itu, motivasi menuntut pemahaman yang cermat tentang apa yang dilakukan organisasi didalam memenuhi kebutuhannya dan apa yang menginspirasi anggotanya. Karena memberikan mekanisme motivasi yang sesuai dapat mengarah pada kinerja yang lebih baik, hal ini kesepakatan awal (*Intial agreement*) dipertimbangkan dalam penelitian ini Studi ini mengukur kesepakatan awal dalam konteks motivasi para pemangku kepentingan dan pelaksana dalam hal altruisme, tujuan organisasi, atau meningkatkan legitimasi organisasi (Dukerich, Golden, & Shortell, 2015).

Selain itu, manajer perlu memahami dan bekerja secara strategis dalam lingkungan kelembagaan dan membangun kapasitas melalui struktur dan proses yang ketat dengan diperlukan komitmen dan koordinasi ekstra untuk bekerja didalam lintas lembaga untuk menuju kolaborasi yang sukses didalam manajemen dan hasil jaringan yang baik (Mcguire & Silvia, 2019). Penting untuk keberhasilan kolaborasi adalah operasionalisasi masing-masing *stakeholder* yang bertanggung jawab terhadap anggota untuk melanjutkan pekerjaan dan mencapai tujuan meskipun tidak adanya kepemimpinan.

Lester & Krejci, (2019) menjelaskan bahwa selama bencana, orang yang menjalankan kepemimpinan lebih penting dari pada orang yang berwenang memimpin. Di sisi lain, komunikasi yang buruk, sesat dan dieksekusi dengan

kepemimpinan yang buruk, kurangnya rencana darurat dan kurangnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta persiapan yang tidak memadai di antara masyarakat, menyebabkan kegagalan kolaboratif (Menzel, et al.,2006); (Wise, 2019) atau kegagalan sektor (Bryson, Crosby and Stone, 2006). Dengan demikian, hipotesa ini akan menjadi dasar peneliti didalam berhipotesis. Studi ini mengukur kepemimpinan menggunakan enam (6) indikator dengan skala 5 poin: visi, kepemimpinan mandiri, memotivasi dan menginspirasi yang lain, memberdayakan orang, berkolaborasi dan mempengaruhi kreativitas dan inovasi.

Secara signifikan, Kapucu (2005) mencatat bahwa respons yang efektif dalam operasi pemulihan membutuhkan kolaborasi dan kepercayaan instansi pemerintah di semua tingkatan dan antara masyarakat dan sektor nirlaba. Umumnya, kepercayaan mengacu pada kepercayaan seseorang dalam melihat keandalan orang lain sehubungan dengan hasil-hasil tertentu sedangkan kepercayaan bersama dimiliki oleh anggota suatu organisasi disebut kepercayaan antar organisasi (Edmondson, 2011). Saling ketergantungan antara lembaga dan organisasi melalui proses interaktif seperti ada nya interaksi *face to face* justru akan meningkatkan kepercayaan, membangun modal sosial dan dapat berkembang ke dalam budaya kolaboratif yang secara substansial meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses (Ansell & Gash, 2008); (Tang & Shui-Yan, 2014); (Paraskevopoulos, 2019); (Kapucu & Arslan, 2015); (Emerson et al., 2011). Dengan demikian, penelitian ini mempertimbangkan kepercayaan, yang diukur dalam hal integritas, kompetensi, dan dependability (Worden, 2019) sebagai salah satu aspek tata

kelola yang harus diteliti dan diuji, Dengan demikian, bisa dilihat di (hipotesis penelitian).

Sementara itu, pembagian kerja dan fungsinya berbeda dalam organisasi dan jaringan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota didalam menciptakan konflik. Jadi, itu keterampilan interpersonal anggota dan hubungan mereka dengan integrasi organisasi harus diperhatikan (Lawrence dan Lorsch, 1967). Selain itu, Bryson et al., (2006) menjelaskan faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keberlanjutan proses kolaborasi: jenis kolaborasi, ketidakseimbangan kekuatan di antara anggota, dan bersaing untuk logika institusional dalam jatah kerja sama. Vangen & Huxham, (2019) percaya bahwa ketidakseimbangan kekuatan di antara berkolaborasi mitra menyebabkan ketidakpercayaan dan memiliki kecenderungan untuk memburuk dalam kasus kesulitan di antara mitra dalam menyetujui tujuan bersama. Karenanya, ketidakseimbangan kekuatan dan bersaing untuk logika kelembagaan adalah ancaman menuju kolaborasi yang efektif tetapi dengan taktik seperti strategis perencanaan dan skenario, kolaborasi pembangunan akan cenderung berhasil (Bryson et al., 2006). Dengan demikian, mengelola konflik, yaitu diukur menggunakan indikator yang terkait dengan fokus tim, gaya pribadi dan orientasi tindakan mengelola konflik (*Managing Conflict*) di Tempat Kerja adalah hal yang dipertimbangkan dalam penelitian ini (lihat hipotesis penelitian dan defines oprasional).

Terakhir, perencanaan (*Planning*) yang efektif. Dikatakan bahwa proses perencanaan harus dilibatkan oleh para pemimpin lembaga yang terlibat dalam

operasi bencana jika tidak, para pemimpin ini akan berusaha untuk menegaskan diri mereka ke dalam situasi bencana meskipun perjanjian sebelumnya dibuat oleh bawahan atau pendahulu, menempatkan semua rencana bencana menjadi sia-sia (Lester & Krejci, 2019). Operasi tanggap bencana dibutuhkan perencanaan yang baik, (Kapucu & Wart, 2006). Jadi, rencana darurat dapat menyebabkan bencana kolaboratif yang berhasil didalam manajemen bencana. Perencanaan seperti yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator berikut: Melakukan Kebutuhan Komprehensif Penilaian, Menentukan Tujuan dan Strategi, Rencana Implementasi, dan Evaluasi (Perencanaan Organisasi).

Mengingat kompleksitas kolaborasi lintas-sektor, apa kemungkinan hasilnya dan bagaimana hal itu dapat dinilai?

### ***2.2.2 Collaborative Outcome and Accountabilities***

Hal lainnya yang penting untuk dilihat adalah tingkatan dari *collaborative governance*. Jhon Wanna (2008) mengklasifikannya pada Lima tingkatan yaitu (1) *Highest Level*, (2) *Medium-High Level*, (3) *Medium Level*, (4) *Medium Low-Level*, (5) *Lowest Level*. Kategori *highest level* terjadi ketika adanya komitmen yang tinggi untuk melakukan kerjasama, interkasi yang saling menguntungkan terjadi antar sesama aktor yang terlibat di dalam kolaborasi, kebersamaan yang substantive, adanya kerjasama yang kuat, dan kerjasama terjadi antara institusi pemerintah dan non-pemerintah. Kategori *Medium-high level* terjadi apabila adanya orientasi yang kuat, penyatuan aktor yang kuat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, memberikan kewenangan kepada client

untuk mengambil keputusan, dan adanya kompleksitas dalam memberikan *service delivery*. Kategori *medium level* terjadi ketika adanya komitmen dengan keberadaan banyak pihak. Kategori *medium low-level* terjadi ketika kerjasama orientasi hanya untuk menyelesaikan pekerjaan saja. Sementara *lowest level* terjadi ketika pearturan kerjasama sudah diabaikan. Untuk melihat sejauh mana kolaborasi yang dilakukan, maka dapat dibuktikan dan dipaparkan dengan menggunakan analisis *smart partial least square* (PLS). Sementara untuk melihat sejauh mana keterlibatan aktor dalam kolaborasi tersebut dilihat dengan menggunakan melalui proses analisis jejaring sosial atau yang di kenal dengan *Sosial Networks Analysis* (SNA). Analisis *smart PLS* merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat dan mengetahui pola hubungan antar variabel maka akan di gambarkan dengan pola coding atau dengan memberikan kode berupa X1 (*Agreement*) X2 (*Leadership*), X3 (*Planning*), dan X4 (*Trust*) serta X5 (*Manajement Conflict*). Sementara untuk pemberian kode terhadap implikasi dan impact dari analisis smart PLS yaitu berupa Y (*Collaboration*), pemberian kode ini di gunakan untuk menguji hipotesis secara singkat. Adapun jumlah responden yang menjadi sampel merupakan keterwakilan dari masing-masing stakeholders, dan dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah keseluruhan stakeholders yang terlibat dalam penanganan masalah dan kasus di lapangan.

Sementara SNA menggambarkan struktur jaringan sebagai properti yang paling nyata dari jaringan. Anklam menjelaskan bahwa struktur jaringan memiliki beberapa pola dasar yaitu struktur pusat, kelompok, dan inti dari jaringan (Anklam, 2014). Analisis jaringan tersebut digunakan sebagai alat pengukuran

untuk menggambarkan jaringan struktur organisasi untuk membantu dalam proses menganalisis sebuah struktur jaringan dan hubungan interaksi yang terbentuk antar organisasi, khususnya *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan masalah. Analisis ini mampu menjelaskan struktur jaringan antara *stakeholders* dengan memberikan gambaran pada kepadatan tipologi jaringan yang dibangun oleh *stakeholders* saat ini. Untuk memastikan seberapa jauh efektivitas yang terpusat kepada jaringan antar *stakeholders*, maka analisa SNA menggunakan enam parameter yaitu dengan menggunakan *density*, *betweenness centrality*, *closeness centrality*, *eigenvector centrality*, *diametres* dan *average distance*. Parameter tersebut di gunakan dalam analisa untuk menentukan organisasi/lembaga mana yang paling berperan terhadap suatu masalah maupun kasus. Metrik selanjutnya adalah diameter jaringan (*diametres networking*), diameter jaringan mengacu pada garis terpanjang dan bisa menunjukkan seberapa besar jaringan tersebut. Gambaran dari diameter jaringan mampu menjelaskan bahwa jaringan dengan diameter besar memungkinkan lebih terdesentralisasi dari pada diameter yang lebih kecil (Kim & Hastak, 2018).

Penelitian ini akan mendeskriptifkan melalui sisi prosesnya yang terdiri dari; (1) *forging agreements* yang merupakan kesepakatan bersama seluruh *stakeholders* untuk melakukan kerjasama, (2) *building leadership* yaitu perlu adanya kepemimpinan baik formal maupun informal sebagai komite atau manajer dari kerjasama tersebut, (3) *building legitimacy* dimana pentingnya membangun legitimasi dengan adanya struktur, proses, dan strategi yang relevan dengan keadaan di sekitarnya, (4) *building trust* yaitu membangun kepercayaan antar

stakeholders yang bekerjasama dan ini sifatnya sangat penting sekali di dalam collaborative governance, (5) *managing conflict* yaitu mengelola konflik yang ada mengingat besarnya kepentingan yang muncul dari masing-masing stakeholders yang terlibat di dalam kerjasama, dan (6) *planning* tahapan yang sangat penting di dalam menentukan visi, misi, tujuan, tahapan, pelaksanaan, keterlibatan dan peran dari masing-masing stakeholders, sehingga planning ini sangat menentukan keberhasilan dari kerjasama.

### **2.3 Kerangka Teoritis**

Secara teoretis, Bryson et al., (2006) melopori pendekatan komprehensif untuk kolaborasi lintas sektor dengan penekanan pada tantangan dan kendala dalam aspek proses dan struktur kolaboratif (konfigurasi dan tata kelola). Thomson & Perry, (2019), Ansell & Gash, (2008), Agranoff, (2019), Provan & Kenis, (2008), Emerson et al., (2011) dan Koschmann, Khunn, & Pfarrer, (2012) secara empiris mengeksplorasi variabel kolaboratif manajemen, teori jaringan serta berbagai faktor dan kemungkinan yang mengarah pada kolaborasi yang sukses. Di sisi lain, Kapucu & Arslan, (2015), Kapucu et al., (2010), Kapucu, Arslan & Collins (2010) meneliti skenario respons manajemen darurat dan mendalilkan teori tentang apa yang merupakan respon bencana yang lebih baik dan efektif.

Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam manajemen bencana memberikan implikasi yang berharga. Mengembangkan lembaga dan struktur polisentris dan berlapis-lapis adalah arsitektur tata kelola

yang ideal untuk meningkatkan kinerja dan untuk membangun ketahanan nasional terhadap risiko dan bencana multi-bahaya lokal dan lintas-batas tetapi tidak sepenuhnya memadai untuk menangani risiko gempa bumi di lapangan akibat risiko tsunami karena masalah kecocokan, kemampuan beradaptasi, keragaman institusional dan norma di Indonesia (Chang Seng, 2010). Selain itu, struktur jaringan baru untuk maritim Indonesia disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan berbagi informasi dalam jaringan maritim Indonesia setelah ditemukan bahwa struktur yang ada tidak cukup mendukung proses berbagi informasi (Jatmiko & Tandiarrang, 2014). Setelah meninjau data bencana sebelumnya dan membandingkan tata kelola lintas sektoral dalam mengelola bencana di Aceh, Gunung Merapi dan Kelud, dan Bendungan Way Ela, terungkap bahwa berbagai jenis bencana di Indonesia menciptakan berbagai model lintas sektor yang berbeda (Nurmandi, A., Qodir, Z., Purnomo, E. P., & Muallidin, 2015).

Bencana dicirikan oleh ukuran yang tidak terduga atau tidak biasa dan menyebabkan gangguan pada kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan, membutuhkan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan interaksi manusia yang intensif (Kapucu & Wart, 2006). Mengelola bencana memerlukan proses dinamis yang ideal namun menuntut pemerintah di semua tingkatan. Kata Yunani "krisis" mengacu pada ketegangan yang menyerukan penilaian kritis, melakukan kritik, reflektivitas, yang akan menginformasikan keputusan yang dicapai dan tindakan yang diambil (Antonacopoulou, Moldjord, Steiro, & Stokkeland, 2019). Dengan kepemimpinan transformasional yang berada di puncak, langkah selanjutnya adalah membuat anggota organisasi yang

sangat terlibat ini tidak hanya melihat kebaikan organisasi tetapi juga kebaikan masyarakat yang lebih besar dengan godaan untuk mengesampingkan respons bencana, kepemimpinan harus mengenali kebutuhan untuk perubahan mendasar dalam hubungan di dalam dan di antara pemerintah (Lester & Krejci, 2019). Dengan demikian, kolaborasi antara organisasi dan lembaga pemerintah sangat penting untuk pengembangan strategi yang efektif dan kinerja yang lebih baik selama tanggap bencana.

Teori dari *disaster management*. Maka, Definisi bencana dalam buku *Disaster Management – A Disaster Manager’s Handbook* adalah suatu kejadian, alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau *progressive*, yang menimbulkan dampak yang dahsyat sehingga komunitas yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa (Sementelli, 2015).

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana (Tang & Shui-Yan, 2014). Manajemen bencana sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan (Steinfort, 2018).

Manajemen bencana menurut (*University British Columbia*) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana

dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual. (Bretton et al., 2015)

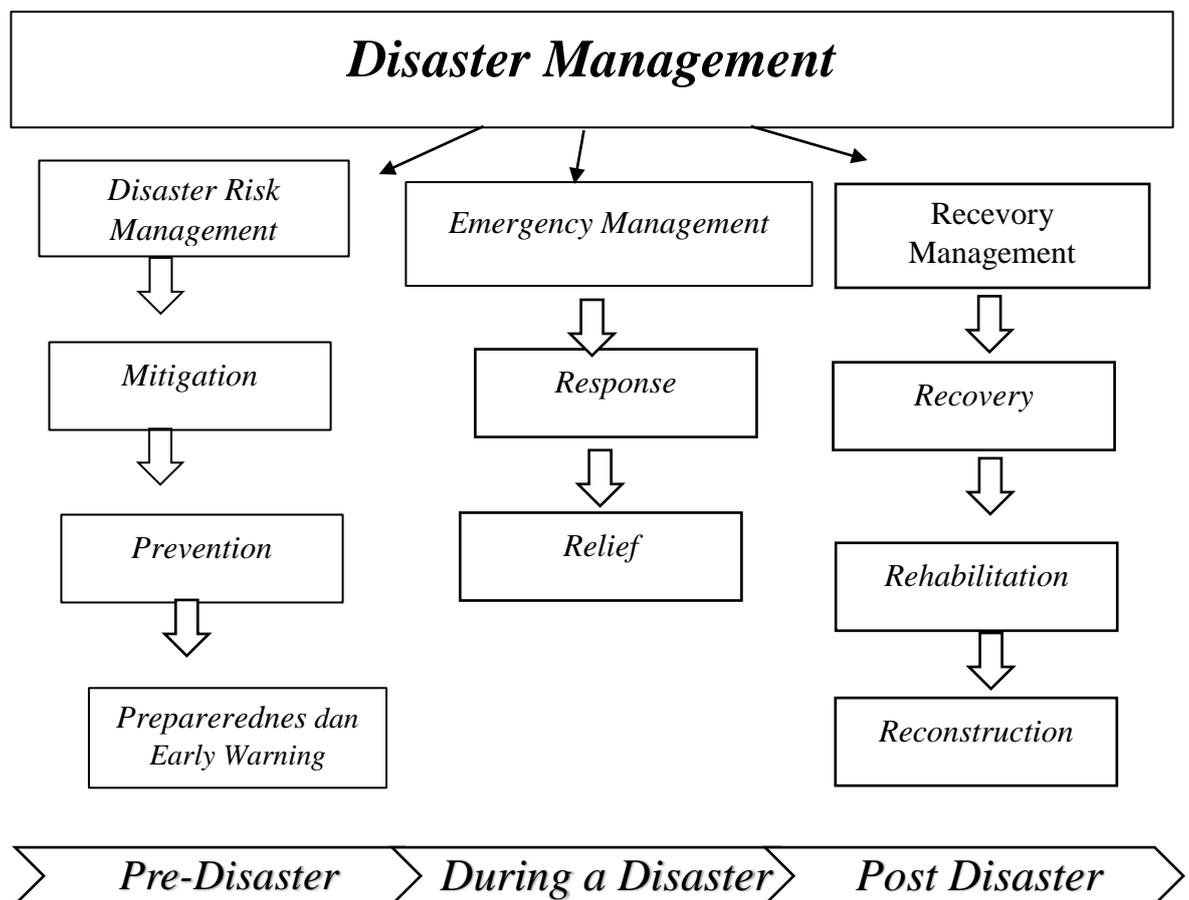
Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup;
- b. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
- c. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman;
- d. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;
- e. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
- f. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Tahapan Manajemen Bencana Dalam konsep manajemen bencana dikenal tiga tahapan utama yaitu “*pra-disaster, during disaster, dan after disaster*”. Setiap tahapan dalam manajemen bencana seharusnya merupakan suatu siklus atau daur yang kontinyu, bertahap dan komprehensif. Selama ini upaya-upaya penanggulangan bencana hanya terfokus pada tahapan “*emergency response*” (tanggap darurat) selama 7-14 hari, padahal seharusnya pada tahapan pra-disaster yang meliputi kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

juga penting, agar kalau terjadi bencana jumlah korban dapat ditekan seminimal mungkin (Weber, Lovrich, & Gaffney, 2007).

Diagram 2.1 *Disater Management*



Sumber : Jatmiko & Tandiarrang, (2014)

Sedangkan untuk Modal sosial. Dudwick et al. (2006) dalam mengukur enam dimensi modal sosial: 1.kelompok dan jaringan (*groups and networks*), 2. kepercayaan dan solidaritas (*trust and solidarity*), 3. tindakan bersama dan kerja sama (*collective action and cooperation*), 4. informasi dan komunikasi (*information and communication*), 5. kohesi sosial dan inklusi (*social cohesion and inclusion*), dan 6. pemberdayaan dan tindakan politik

*(empowerment and collective action)*). Untuk penelitian ini, fokus kami adalah hanya pada dimensi kepercayaan, solidaritas, kohesi sosial dan inklusi.

Kepercayaan dan solidaritas sebagai dimensi modal sosial berkaitan dengan “sejauh mana orang merasa bahwa mereka dapat mengandalkan kerabat, tetangga, rekan kerja, penyedia layanan publik, dan bahkan orang asing, baik untuk membantu mereka atau (setidaknya) melakukan pertolongan” (Dudwick et al. 2006). Kadang-kadang, kepercayaan mencerminkan ketergantungan dan bukan hanya pilihan belaka karenanya, kepercayaan yang membedakan dari ketergantungan penting untuk memahami berbagai hubungan sosial masyarakat dan kemampuan dari hubungan ini bertahan keadaan yang sulit atau berubah dengan cepat. Kuehnast dan Dudwick (2004) menawarkan dua matriks dalam mengukur kepercayaan sosial karena mereka mempelajari jaringan sosial di Republik Kyrgyz. Matriks pertama membahas pertanyaan-pertanyaan seperti: “? Apa yang Anda berikan dan kepada siapa” dan “Apa yang Anda terima dan dari siapa?” Matriks diisi oleh seorang pewawancara menggunakan salah satu jawaban berikut: “selalu”, “sebagian besar waktu,” “kadang-kadang,” atau “jarang atau tidak pernah”. Selain itu, matriks kedua menggambarkan jenis orang yang merupakan bagian integral untuk satu rumah tangga masyarakat, “Kepada siapa Anda berpaling untuk meminta bantuan atau pertolongan?”

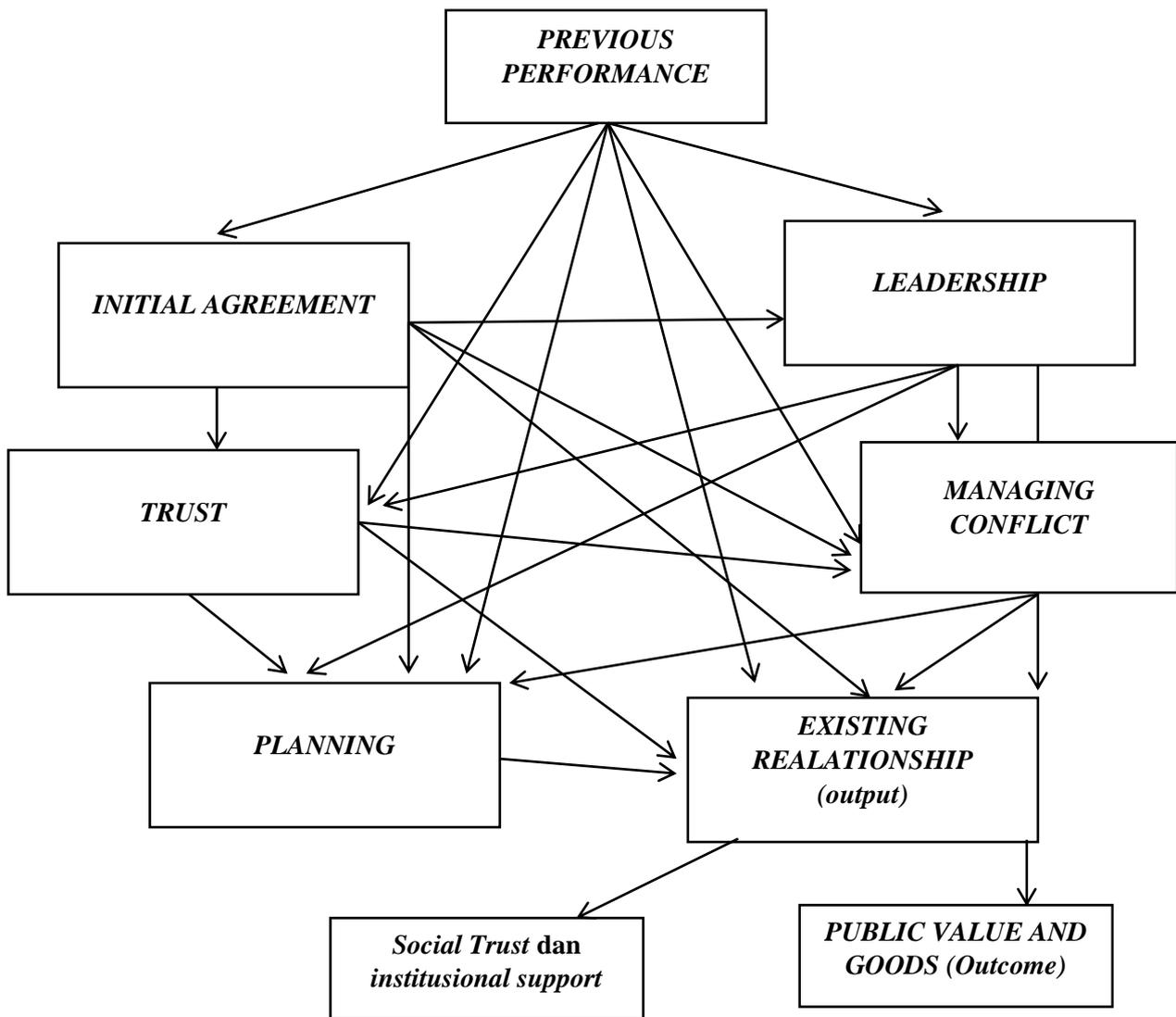
Selain itu Kohesi sosial dan inklusi menurut Durkheim (1897) yang dikutip oleh Soekanto (2010) konsep solidaritas sosial yang mengacu pada sejauh mana orang-orang yang terhubung dengan satu sama lain dalam sistem

sosial adalah konsep yang menurut penulis berhubungan dengan kohesi sosial. Kohesi sosial ini bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi, kohesi sosial bukan merupakan suatu proses natural yang terjadi begitu saja, namun merupakan hasil dari hubungan dari individu dengan lembaga atau institusi dalam suatu aturan yang diakui dalam suatu komunitas sosial. Jenson (1998) yang dikutip oleh Kulig et al. (2014) menyebutkan beberapa dimensi dalam kohesi sosial: 1) milik; berarti nilai-nilai bersama, identitas, perasaan komitmen, 2) inklusi; menyangkut kesempatan akses yang sama, 3) partisipasi; kemauan anggota untuk terlibat, 4) pengakuan; membahas isu menghormati dan toleransi perbedaan dalam masyarakat pluralis, dan 5) legitimasi; pengakuan dari para anggota mengenai anggota lainnya. Kohesi sosial ini dapat menjadi dasar terpengaruhnya sense of community yang diukur melalui pemenuhan kebutuhan, keterlibatan anggota, memberikan pengaruh, dan berbagi kontak emosional sehingga ketika adanya gangguan eksternal komunitas dapat melakukan aksi kolektif sebagai strategi bertahan.

Sedangkan inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Pada umumnya penelitian melihat dalam perspektif modal sosial dalam

hal kepercayaan dan solidaritas serta kohesi sosial dan inklusi di masyarakat dalam memahami bagaimana modal sosial terbentuk dalam kondisi pascabencana.

#### 2.4 Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Penulis, (2019)

## **2.5 Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis empiris tentang apa yang terkait dalam Tata Kelola Bencana (*Disaster Management*) dan berhasil dalam konteks penanganan Erupsi Merapi di Indonesia. Kerangka kerja pada tata kelola kolaboratif (Bryson et al., 2006) dan tata kelola jaringan (Provan & Kenis, 2008) serta konsep-konsep tertentu dari penelitian sebelumnya, secara khusus digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi tiga aspek utama tata kelola kolaboratif bencana. hipotesis pertama penelitian ini meneliti bagaimana struktur jaringan mempengaruhi kinerja setiap aktor dari tata kelola kebencanaan, serta jaringan manajemen bencana dalam menghadapi kebencanaan khususnya Erupsi Gunung Merapi . Hipotesis 2 penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara aspek proses tata kelola kolaboratif dengan menjawab pertanyaan "Bagaimana kinerja sebelumnya dari jaringan manajemen bencana mempengaruhi aspek proses tata kelola misalnya (perjanjian awal, kepemimpinan, perencanaan, kepercayaan, dan mengelola konflik) dan bagaimana caranya hubungan mempengaruhi hubungan yang ada dalam jaringan. Hipotesis 3 penelitian ini menyelidiki dampak tata kelola bencana terhadap modal sosial di masyarakat dan bagaimana modal sosial membentuk kondisi pascabencana di masyarakat yang terkena dampak.

### **2.5.1 Hipotesis Penelitian**

Sugiyono, (2017) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner. Maka dengan ini peneliti memberikan hipotesis sementara yaitu:

- H1. Ada hubungan yang signifikan antara *Previous performace* dan *Initial Agreement*
- H2. Ada hubungan yang signifikan antara *Previous performance* dan *Trust*
- H3. Ada hubungan yang signifikan antara *Previous performance* dan *planning*
- H4. Ada hubungan yang signifikan antara *Previous performance* dan *leadership*
- H5. Ada hubungan yang signifikan antara *Previous performance* dan *managing conflict*
- H6. ada hubungan yang signifikan antara *Previous performance* dan *existing relationship*
- H7. Ada hubungan yang signifikan antara *initial agreement* dan *leadership*
- H8 Ada hubungan yang signifikan antara *intial agreement* dan *trust*
- H9 Ada hubungan yang signifikan antara *intial agreement* dan *planning*
- H10. Ada hubungan yang signifikan antara *initial agreement* dan *managing conflict*
- H11. Ada hubungan yang signifikan antara *intial agreement* dan *existing relationship*
- H12. Ada hubungan yang signifikan antara *leadership* dan *trust*
- H13. Ada hubungan yang signifikan antara *leadership* dan *planning*
- H14. Ada hubungan yang signifikan antara *leadership* dan *managing conflict*
- H15. Ada hubungan yang signifikan antara *leadership* dan *existing relationship*
- H16. Ada hubungan yang signifikan antara *trust* dan *planning*
- H17. Ada hubungan yang signifikan antara *trust* dan *managing conflict*

H18. Ada hubungan yang signifikan antara *trust* dan *existing relationship*

H19. Ada hubungan yang signifikan antara *managing conflict* dan *planning*

H20. Ada hubungan yang signifikan antara *managing conflict* dan *existing relationship*

H21. Ada hubungan yang signifikan antara *Planning* dan *existing relationship*

## 2.6 Definisi Operasional dan Konseptual

Definisi operasional Menurut Sugiyono (2012) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Maka adapun Definisi Konseptual dan Operasional dalam Penelitian ini :

Konsep	Variabel-Variabel	Indikator
<b>Variabel Inti atau Independen</b>	<b>Kondisi Awal : Persiapan Tata Kelola Kebencanaan (<i>Initial condition: Previous Performance Collaborative Effectiveness</i>)</b> <i>"The attainment of positive network-level outcomes that could not normally be achieved by individual organizational participants acting independently."</i> - (Provan & Kenis, 2008).	A. Pencapaian Target <i>Collaborative Governance</i> dalam <i>Disaster Risk and Management</i> B. Penilaian Responden
<b>A. Proses</b>	<b>Perjanjian Awal (<i>Initial agreements</i>)</b> Bryson et al., (2006) <i>emphasized that although informal agreements can work in the collaborative process, formal agreements have a better advantage as it supports accountability.</i>	<b>Motivasi:</b> Altruisme, Tujuan Organisasi, Meningkatkan Legitimasi Organisasi.

<b>B. Struktur</b>	<p><b>Pembangunan Kepemimpinan (<i>Building Leadership</i>)</b>  <i>“Cross-sector collaborations are likely to succeed when they have committed sponsors and effective champions at many levels who provide formal and informal leadership.” Bryson (2006)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. visi,</li> <li>2. memotivasi dan menginspirasi orang lain,</li> <li>3. memberdayakan orang,</li> <li>4. berkolaborasi dan mempengaruhi</li> <li>5. kreativitas dan inovasi.</li> </ol>
	<p><b>Kepercayaan dan Nilai (<i>Trust and Value</i>)</b>  <i>Trust is “both the lubricant and the glue” as it facilitates the work in the collaboration and it holds collaboration together – Bryson et.al (2006)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas</li> <li>2. Kompetensi Ketergantungan.</li> </ol>
	<p><b>Tata Kelola Konflik (<i>Managing Conflict</i>)</b>  <i>According to Gray (1996), power issues are the prime causes of conflict and as Bryson et.al puts it, resources and tactics should be used in order to equalize the status of the organizations (2006).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Focus (<i>Team Focus</i>)</li> <li>2. Gaya Keperibadian (personal style action orientation)</li> </ol>
	<p><b>Perencanaan (<i>Planning</i>)</b>  <i>Cross-sector collaborations are most likely to succeed if deliberate and emergent planning is made and if such planning makes use of stakeholder analyses, emphasizes responsiveness to key stakeholders, uses the process to build trust and the capacity to manage conflict and builds on distinctive competencies for collaborators” (Bryson et.al 2006).</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Kebutuhan</li> <li>2. Tujuan dan Strategi</li> <li>3. Penerapan Rencana Evaluasi.</li> </ol>
	<p><b>Konfigurasi Struktural (<i>Structural Configuration</i>)</b>  <i>Structural configurations affect a network’s overall effectiveness, - Provan and Milward (1995) dan Provan and Sebastian (1998).</i></p>	<p>Analnsisi jaringan sosial/ AJS (<i>Social Network Analysis</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Centrality</i></li> <li>2. <i>Closeness</i></li> <li>3. <i>Betweenness</i></li> </ol>
	<p><b>Struktur Pemerintahan (<i>Governance Structure</i>)</b>  <i>Network governance emerges through frequent, structured exchanges that develop network level</i></p>	

	<i>values, norms and trust, enabling the social mechanism to coordinate and monitor behavior (Ostrom 1990).</i>	
<b>Variabel Ketergantungan</b>	<b>Output: Hubungan yang ada (<i>Existing Relationships</i>)</b>	Karakteristik Kepadatan Jaringan, diameter, dan jarak rata-rata
	<b>Outcome: <i>Public Value and Goods</i></b> <i>Cross-sector collaboration most likely creates public value when they produce positive first-, second-, and third-order effects (Innes and Booher 1999 in Bryson et.al 2006).</i>	Modal Sosial ( <i>Social Capital</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepercayaan sosial (<i>Social Trust</i>)</li> <li>2. Dukungan kelembagaan (<i>Institutional Support</i>)</li> </ul>

Sumber: Diolah Penulis, (2019)